

POLICY BRIEF

MENCIPTAKAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK YANG LEBIH INKLUSIF

PENDAHULUAN

Komunikasi publik yang efektif merupakan elemen krusial dalam implementasi kebijakan yang berdampak luas pada masyarakat. Selama empat bulan terakhir, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menerapkan berbagai kebijakan, namun komunikasi ke publik kurang sistematis dan inklusif. Apalagi banyak penilaian yang kurang memuaskan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selain itu, dinamika politik nasional yang mencakup perubahan prioritas kebijakan dan alokasi anggaran, turut mempengaruhi kesinambungan program-program strategis.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat menyampaikan tanggapan terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat dengan cara yang kurang etis. Hal tersebut berdampak pada menguatnya resistensi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang efektif menjadi penting dalam memastikan kebijakan dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) yang diselenggarakan oleh LaporIklim bersama koalisi masyarakat sipil pada 24 Maret 2025, mengidentifikasi tantangan utama serta rekomendasi kebijakan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah di Indonesia. Salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah pola komunikasi pejabat publik yang berpengaruh terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Berikut temuan utama dan rekomendasi dari hasil pemikiran bersama sebagai bentuk partisipasi publik secara aktif untuk menguatkan komunikasi kebijakan publik yang lebih inklusif oleh pemerintah.

TEMUAN UTAMA

1. Informasi Kebijakan Pemerintah Kurang Transparan.

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah seyogyanya mampu mengimplementasikan transparansi di mana informasi tentang kebijakan tersedia, cara penyampaian mudah dipahami publik, akuntabilitas terjamin, dan publik mengetahui dan secara aktif menjalankan perannya dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan (Finkelstein, 2000). Sayangnya, masyarakat masih

menghadapi kendala dalam mengakses informasi terkait kebijakan pemerintah, sehingga mengurangi pemahaman dan dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan dan program pemerintah sebaiknya disosialisasikan lebih masif dengan cara-cara yang lebih relevan, terutama melalui media sosial (OECD, 2021). Sosialisasi juga diharapkan tidak hanya output dari perencanaan kebijakan tetapi mencakup seluruh proses penyusunan kebijakan dengan landasan yang valid. Jajak Pendapat Kompas menyebutkan 68,8 persen publik merasa kebijakan atau program pemerintah belum tersosialisasikan dengan baik (Kompas, 2025).

2. **Minimnya Ruang Dialog dan Partisipasi Publik.**

Selama periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran, banyak isu-isu krusial yang idealnya menuntut dinamika interaksi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat. Sayangnya, ruang dialog tersebut tampak menyempit, sehingga yang muncul adalah perang narasi antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya di media sosial. Kejadian teror kepada media Tempo dan serangan doxing kepada wartawannya menambah parah tekanan ruang dialog dan kebebasan berpendapat (Tempo, 2025). Perbincangan warganet di media massa dan sejumlah pakar mengkhawatirkan beberapa peristiwa ini menjadi bentuk pembungkaman media massa yang mirip pada kondisi di zaman Orde Baru.

Keterlibatan publik dalam penyusunan kebijakan pemerintah juga minim. Seperti baru-baru ini, sangat disayangkan penyusunan RUU TNI diselenggarakan tertutup dan terkesan terburu-buru. Padahal, secara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sejumlah asas, salah satunya asas keterbukaan (hukumonline, 2025). Ada jarak yang terpaut jauh antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan. Ketidakhadiran ruang dialog membuat preseden buruk bagi stabilitas politik, sosial, dan ekonomi hingga di level tapak.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan masih rendah, yang berakibat pada kurangnya rasa memiliki dan keterlibatan aktif dalam implementasi kebijakan. Apalagi gaya komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung tertutup (Maulida, 2025). Komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga cenderung satu arah. Hal ini diindikasikan dari respon pemerintah terhadap kritik dan

pendapat publik terkait kebijakan pemerintah yang cenderung menolak dan meremehkan (Maulida, 2025).

3. **Pengelolaan Sumber Daya Perlu Berkelanjutan.**

Agenda pembukaan lahan 20 juta hektar untuk program pangan dan energi dikhawatirkan akan menimbulkan sejumlah konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Ketidakjelasan lokasi pembukaan lahan terutama pada hutan dikhawatirkan ditunggangi kepentingan korporasi (WALHI, 2024). Bukan hanya itu saja, rencana besar itu berisiko semakin memarjinalkan masyarakat adat (BBC, 2025). Kebijakan dan program di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya seperti perikanan, tambang, dan pengelolaan hutan lindung juga cenderung mengutamakan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Kekhawatiran ini bukanlah tanpa dasar. Apabila dilihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pengelolaan sumber daya di Indonesia cenderung mengabaikan hak-hak masyarakat marginal. Bentrokan antara kepentingan rakyat di lahan pengelolaan sumber daya alam dengan korporasi maupun pemerintah seringkali diselesaikan dengan cara sepihak. Akibatnya ruang penghidupan rakyat tersisihkan begitu saja.

4. **Kebijakan Anti-Sains.**

Pernyataan presiden dan pejabat publik pada beberapa kesempatan diungkapkan tanpa didasari fakta, pengetahuan, riset, dan sains (WALHI, 2024). Memang pada sejumlah kebijakan dan program, pemerintah menggandeng ilmuwan-ilmuwan untuk melegitimasi keabsahan bukti-bukti saintifik sejumlah programnya. Namun, apa yang muncul di kalangan publik justru sebaliknya. Justru keterlibatan ilmuwan-ilmuwan di balik program pemerintah saat ini cukup mengundang tanya publik tentang politik anti sains dengan berkedok program berbasis sains.

Sejumlah kebijakan anti sains yang menjadi *concern* masyarakat adalah proyek lumbung pangan di Merauke, Papua Selatan, swasembada energi melalui biofuel dan transisi energi, perluasan perkebunan sawit, hingga makan bergizi gratis. Kebijakan-kebijakan tersebut belum menempatkan keberlanjutan lingkungan dan agenda penurunan emisi karbon sebagai target utama. Bahkan, ada banyak konflik sosial yang muncul dalam implementasinya. Perencanaan kebijakan membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam, sehingga menghasilkan opsi yang lebih inklusif berbasis pemenuhan hak asasi manusia. Sudut pandang anti sains hanya akan

mendorong kemunduran dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

5. **Pemanfaatan Media Digital Bias Kepentingan.**

Perdebatan di media digital selalu mempertemukan masyarakat dengan kelompok pendengung atau *buzzer*. Bahkan, tidak sedikit *buzzer* mengeluarkan pernyataan yang nir-empati saat merespons pemikiran kritis masyarakat, contohnya saat kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis. Ada kekhawatiran bahwa media digital saat ini menjadi medium *buzzer*, bukan ruang diskusi kritis untuk publik.

Pembentukan ruang diskusi di media digital sebenarnya adalah cara yang tepat untuk membangun literasi tentang kebijakan pemerintah, tentu dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang di dalamnya. Apalagi saat ini penetrasi internet di Indonesia mencapai 74,6 persen (Datareportal.com, 2025). Belum lagi, proporsi jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 50,2 persen dari total penduduk Indonesia. Ini artinya internet dan media sosial menjadi peluang untuk mengomunikasikan dan mensosialisasikan kebijakan atau informasi pemerintah.

Optimalisasi media sosial sebagai sarana komunikasi publik oleh pemerintah memang telah dirasakan 50 persen publik (Kompas, 2025). Namun, Informasi dan konten-konten sosialisasi yang disusun untuk disebarluaskan di media sosial seringkali kurang sesuai dengan iklim media sosial dan kurang relevan dengan audiens. Di sisi lain, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berpotensi menggalang partisipasi warga negara dalam proses demokrasi (Haksoro, 2024). Hal ini dapat menjadi optimal apabila kebebasan, keamanan, dan keadilan di ruang digital dalam berpendapat juga dijaga. Meski demikian, rendahnya literasi digital masyarakat, banyaknya misinformasi-disinformasi-hoaks, serta polarisasi digital masih menjadi hambatan dalam memanfaatkan ruang digital sebagai ruang bagi partisipasi publik.

6. **Dinamika Politik dan Kebijakan Pemerintah Berimbas ke Berbagai Sektor.**

Penurunan IHSG pada 18 Maret 2025 hingga mencapai 6,12 persen menjadi salah satu dampak kondisi dalam negeri yang kurang stabil serta munculnya kebijakan pemerintah yang menimbulkan kekisruhan. Belum lagi munculnya Danantara menyebabkan investor asing enggan mengalirkan modalnya di Indonesia. Dalam kurang lebih tiga bulan pertama 2025, aliran modal asing yang keluar mencapai Rp

20,12 triliun (Tempo.co, 2025). Ketidakstabilan kondisi dalam negeri dan ketidakjelasan kebijakan pemerintah berdampak pada berbagai sektor.

7. **Gaya Komunikasi Pejabat Publik.**

Pejabat publik di Indonesia memiliki pendekatan komunikasi yang berbeda-beda, mulai dari yang sangat formal hingga gaya komunikasi yang lebih santai di media sosial. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan kebijakan oleh masyarakat dan juga berimbas pada sentimen publik terhadap citra pemerintah. Sangat disayangkan, komunikasi dan respon pemerintah dalam berbagai kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini kurang menunjukkan empati, merangkul harapan publik dan cenderung defensif (CNN, 2025). Akibatnya respon itu malah berlanjut menambah kegaduhan di masyarakat.

REKOMENDASI

1. **Meningkatkan Transparansi dan Aksesibilitas Informasi.**

Pemerintah perlu menyediakan kanal komunikasi yang lebih mudah diakses, seperti portal daring yang interaktif dan laporan kebijakan dalam format yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain itu pemerintah perlu membuka lebih luas komunikasi dua arah melalui kanal-kanal digital agar publik bisa berperan dalam mengawasi, menyampaikan kebutuhan, hingga menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan atau kebijakan pemerintah. Media sosial perlu juga dibuat lebih terbuka, menerima dialog publik, dan transparan. Peran media sosial dalam pemerintahan yang optimal akan menarik kepercayaan publik pada pemerintah dan mengurangi kekhawatiran publik terhadap situasi terkini (Al-Omouh et al., 2023).

2. **Mendorong Partisipasi Publik yang Lebih Luas.**

Pemerintah perlu melibatkan komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam proses perumusan serta implementasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam hal partisipasi publik, Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya skor E-Participation Index dari 0,29 pada 2014 menjadi 0,79 pada 2024 (UN E-Government Knowledgebase, 2024). Namun, dalam kenyataannya, meningkatnya skor indeks itu hanya terlihat dari semakin banyaknya wadah untuk menampung aspirasi publik (Aswin, 2023). Saluran atau ruang penyampaian aspirasi publik perlu

ditingkatkan dengan memberikan sarana untuk memantau aspirasi dan memberikan respon atau aspirasi publik.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital.

Pemerintah dapat meningkatkan pemanfaatan media sosial, aplikasi seluler, dan kampanye digital sebagai alat komunikasi utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Selain itu dalam membuat konten informasi kebijakan terutama di media sosial, perlu diperhitungkan mekanisme sistem dan algoritma media sosial misalnya *attention span* audiens yang hanya 8,25 detik (Samba recovery, 2025).

4. Menjamin Keberlanjutan Kebijakan di Tengah Dinamika Politik.

Perlu adanya mekanisme regulasi yang kuat dan berbasis bukti untuk memastikan bahwa kebijakan publik tetap menjadi prioritas nasional, terlepas dari perubahan politik dan kepentingan ekonomi. Kepastian kebijakan yang berpihak pada publik dan menjadi prioritas bangsa saat ini menjadi penting. Hal ini karena 20,9 persen publik merasa polemik dan penolakan kebijakan pemerintah saat ini dipicu oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil (Kompas, 2025).

5. Standarisasi dan Penguatan Komunikasi Pejabat Publik.

Pejabat pemerintah perlu diberikan panduan komunikasi yang jelas agar penyampaian kebijakan lebih konsisten, akurat, dan dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Pemanfaatan media sosial oleh pejabat publik juga harus diarahkan agar tetap profesional dan informatif.

KESIMPULAN

Strategi komunikasi publik yang efektif merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah di Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi informasi, mendorong partisipasi publik yang lebih luas, menyederhanakan penyampaian kebijakan, serta memanfaatkan media digital secara optimal, pemerintah dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, stabilitas politik dan komitmen lintas pemerintahan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas kebijakan publik di Indonesia. Pejabat publik juga memegang peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat melalui komunikasi yang konsisten, profesional, dan efektif.



Yayasan Warga Berdaya Untuk Kemanusiaan

Komplek Ruko Bona Indah Plaza, Jalan Karang Tengah Raya Blok.A2-BH,
Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta – 12440

Website: <https://laporklim.wargaberdaya.org/>

Email: laporklim@wargaberdaya.org

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil Diskusi Kelompok Terarah (FGD) melalui platform Laporklim dan koalisi masyarakat sipil. Bertujuan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi para pengambil kebijakan dalam meningkatkan komunikasi publik terkait kebijakan pemerintah di Indonesia.

Narahubung:

Yoesep Budianto - 085648973423

Email: laporklim@wargaberdaya.org

Website: <https://laporklim.wargaberdaya.org/>

REFERENSI

WALHI. 2024. *Bahaya Rencana Pembukaan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan dan Energi.*

Diakses dari

<https://www.walhi.or.id/uploads/2024-Rilis/Brief%20Paper%20Masyarakat%20Sipil%2020%20Juta%20Hektar%20Hutan%202025.pdf>

Utama, A. 2025. *Mengapa rencana pembukaan 20 juta hektare hutan untuk lahan pangan 'untungkan korporasi dan merugikan warga'? – Kesaksian Orang Rimba yang tersisih dari hutan leluhur.* BBC News Indonesia. Diakses dari

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/czx594201glo>

Martiar, N. 2025. *Teror hingga "Doxing" Merajalela, Ruang Rakyat Berekspresi Semakin Sempit.* Kompas.id. Diakses dari

<https://www.kompas.id/artikel/teror-hingga-doxing-merajalela-ruang-rakyat-berekspresi-semakin-sempit>

Muhid, H. 2025. *4 Hari 3 Teror Dialami Tempo: Paket Kepala Babi, Bangkai Tikus, dan Doksing Wartawan.* Tempo. Diakses dari

<https://www.tempo.co/hukum/4-hari-3-teror-dialami-tempo-paket-kepala-babi-bangkai-tikus-dan-doksing-wartawan--1223881>

Nugraha, M. 2025. *Di Tahap Mana Publik Bisa Berpartisipasi dalam Pembentukan UU?.*

Hukum Online.com. Diakses dari:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-tahap-mana-publik-bisa-berpartisipasi-dalam-pembentukan-uu-1t5fa11a34d604b/>

WALHI. 2025. *Pernyataan Presiden Prabowo Anti Sains dan Rentan Melegitimasi Pendekatan Keamanan di Bisnis Sawit.* Diakses dari:

<https://www.walhi.or.id/ Pernyataan-presiden-prabowo-anti-sains-dan-rentan-melegitimasi-pendekatan-keamanan-di-bisnis-sawit>

Finkelstein, N. 2000. *Transparency in Public Policy.* London: Palgrave Macmillan UK.

Pancawati, D. 2025. *Jajak Pendapat Kompas: Pemerintah Perlu Perbaiki Komunikasi Publik.*

Kompas. Diakses dari:

<https://www.kompas.id/artikel/jajak-pendapat-kompas-pemerintah-perlu-perbaiki-komunikasi-publik>

Haksoro, T. 2024. *Optimalisasi Pemanfaatan Kanal Komunikasi Digital bagi Generasi Muda Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Diakses dari:

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000101/swf/7866/87%20-%20Tri%20Haksoro.pdf>

Datareportal. 2025. *Digital 2025: Indonesia*. Diakses dari:

<https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>

Maulida, R.A. 2025. *Komunikasi publik kabinet ‘gemoy’ Prabowo belum transparan dan tak hiraukan kritik*. The Conversation. Diakses dari:

<https://theconversation.com/komunikasi-publik-kabinet-gemoy-prabowo-belum-transparan-dan-tak-hiraukan-kritik-242928>

Putri, R.S. 2025. *Bagaimana Bisa Kebijakan Pemerintah Memicu Modal Asing Keluar Indonesia*. Tempo.co. Diakses dari :

<https://www.tempo.co/ekonomi/penyebab-aliran-modal-asing-keluar-1218333>

OECD. 2021. *OECD Report on Public Communication: The Global Context and The Way Forward*. Diakses dari :

https://www.oecd.org/en/publications/oecd-report-on-public-communication_22f8031c-en.html

United Nation. 2024. UN E-Government Knowledgebase. Diakses dari:

<https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/78-Indonesia>

Al-Omouh, K.S., Garrido, R. dan Canero, J. 2023. The impact of government use of social media and social media contradictions on trust in government and citizens’ attitudes in times of crisis. *Journal of Business Research*. **159**. Diakses dari:

<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113748>

SambaRecovery. 2025. Average Human Attention Span Statistics & Facts [2024]. Diakses dari:

<https://www.sambarecovery.com/rehab-blog/average-human-attention-span-statistics>